

## **SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN**

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

---

### **ANALISIS STRATEGI, METODE DAN ALAT PENDETEKSIAN FRAUD YANG DIGUNAKAN DI DUNIA, ASIA PASIFIK DAN INDONESIA**

**Natalis Christian**

*Universitas Internasional Batam*

Email: [natalis.christian@uib.ac.id](mailto:natalis.christian@uib.ac.id)

**Josephine Ardini Yaputri**

*Universitas Internasional Batam*

Email: [1942132.josephine@uib.edu](mailto:1942132.josephine@uib.edu)

**Natasya Des T.G**

*Universitas Internasional Batam*

Email: [1942120.natasya@uib.edu](mailto:1942120.natasya@uib.edu)

---

#### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisa strategi, metode, dan alat yang digunakan oleh berbagai firma yang ada di dunia dan berbeda negara dalam melakukan pendeteksian fraud. Fraud telah menjadi hal yang sering ditemui di perusahaan. Sebagai bentuk pencegahan, diperlukan pendeteksian yang kuat. Pendeteksian fraud telah bervariasi mengikuti zaman. Setiap negara memiliki lembaga memiliki strategi masing-masing dalam mendeteksi fraud seperti teknologi dan strategi pendeteksian lainnya yang mendukung prosedur pendeteksian dan mencegah risiko yang terjadi. Tanpa adanya pendeteksian yang baik dan optimal, maka tindakan fraud akan semakin meningkat. Hasil penelitian juga ini memaparkan prosedur pendeteksian yang memiliki implikasi yang beragam yang dimana bermanfaat dalam pendeteksian fraud.*

*Kata kunci: fraud, metode, strategi, alat deteksi*

---

### **ANALYSIS OF STRATEGIES, METHODS, AND FRAUD DETECTION TOOLS USED IN THE WORLD, ASIA PACIFIC, AND INDONESIA**

#### ***Abstract***

This study aims to compare and analyze the strategies, methods, and tools that used by various firms in the world from different countries in detecting fraud. Fraud had become a common thing in every company. As a form of prevention of fraud, a strong detection is needed. Fraud detection has been developed following the times. Every countries has their own firm with their fraud detection strategies by using technology and the others strategies to support fraud detection and preventing the risk caused. The result of this study described the procedures and implications that have various useful function in detecting fraud.

***Keywords: fraud, methods, strategy, detection tools***

---

## PENDAHULUAN

Fraud merupakan tindakan yang menjadi tantangan bagi seluruh dunia yang juga merupakan fenomena universal yang sudah ada sejak lama dan telah bervariasi sehingga perlu strategi lebih lanjut (Repousis *et al.*, 2019). *Fraud* telah menimbulkan kerugian besar yang terjadi di banyak perusahaan yang dimana mengindikasikan bahwa pendeteksian *fraud* penting untuk diteliti (Siregar & Tenoyo, 2015). Walaupun demikian, tidak semua lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pemeriksaan melakukan strategi yang sama.

Selama bertahun-tahun, setiap firma yang berwenang dalam meneliti dan mendeteksi terjadinya *fraud* terus meriset strategi, metode, dan alat yang mereka gunakan. *Fraud* yang memuat kegiatan aktivitas kriminal akan dilakukan apabila keuntungan yang akan didapat atas kecurangan melebihi hukuman yang akan diterima apa kegiatan *fraud* tersebut terdeteksi (Kummer *et al.*, 2015). Jenis tindakan *fraud* yang dilakukan oleh *fraudster* sangat bervariasi dengan keuntungan yang berbeda yang menyebabkan naiknya kerugian oleh perusahaan dan tentunya termasuk kepada seluruh pemangku kepentingan. Maka dari itu, cara dan metode pendeteksian yang dilakukan oleh berbagai firma sangat bervariasi mengikuti kondisi yang berlangsung.

Seperti yang diketahui bahwa pelaku *fraud* semakin banyak dan semakin tidak terlihat karena *fraud* dilakukan secara diam dan mulai merajai karena perkembangan teknologi. Seiring berjalannya waktu, maka semakin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi dalam melakukan kegiatannya baik secara operasional maupun tidak (Kolli & Tatavarthi, 2020). Hal tersebut mengindikasikan kepada auditor untuk melakukan pendeteksian yang lebih canggih karena jaringan teknologi yang luas.

Baik perusahaan yang berskala besar atau kecil, keduanya sama-sama memiliki potensia yang besra untuk terjadi *fraud*. Hal tersebut mengindikasi bahwa pencegahan *fraud* dan pendeteksiannya merupakan perhatian utama bagi seluruh pemangku kepentingan (Kolli & Tatavarthi, 2020). Pendeteksian akan *fraud* memiliki tujuan agak dapat dilakukan pencegahan dan penindakan secepatnya agar tidak memakan lebih banyak korban.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Auditor internal memiliki peran yang sangat signifikan dalam menangani masalah dan pendeteksian akan *fraud* secara internal karena akan memiliki dampak terhadap risiko strategis, risiko bisnis, dan risiko yang berkaitan dengan penindakan *fraud* di perusahaan. Berbeda dengan auditor internal, auditor eksternal memiliki tanggung jawab akan efektivitas proses audit. Maka dari itu, diperlukan strategi pendeteksian *fraud* (Kolli & Tatavarthi, 2020). Beberapa contoh implementasi dari strategi pendeteksian *fraud* seperti *monitoring*, *assessing*, dan *communicating* (PricewaterhouseCoopers, 2018).

Strategi yang ada akan dirancang dan dikembangkan oleh masing-masing firma dan juga perusahaan untuk melakukan deteksi terhadap *fraud* yang bervariasi dan sampai dengan tujuannya. Segala bentuk strategi yang dirancang akan kembali ke tujuan dan target pendeteksian *fraud* yang ditujukan.

Pendeteksian tindakan *fraud* dapat dilakukan dalam berbagai metode pendeteksian, Metode pendeteksian tersebut dirancang untuk mendeteksi *fraud* secara efektif. Berdasarkan laporan PwC (2014), pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan merupakan metode pendeteksian yang paling efektif apabila dibandingkan dengan lainnya. *Fraud* memiliki tingkat kerumitan yang berbeda dalam pendeteksiannya yang memiliki efek terhadap peningkatan permintaan akan jaminan secara tepat waktu dan jugat erhadap efektivitas manajemen resiko dan sistem pengendalian (Kummer *et al.*, 2015). Artinya, semakin rumit tingkat *fraud* yang terjadi maka semakin kompleks metode yang digunakan.

Metode yang digunakan juga mewakili prosedur dari pendeteksian. Metode pendeteksian juga berkaitan erat dengan strategi yang dilakukan karena merupakan kesatuan dari perencanaan

dalam melakukan deteksi terhadap *fraud*. Maka dari itu, *fraud* yang terdeteksi tidak hanya melalui pendeteksian secara sengaja, tetapi juga dapat dilakukan tanpa kesengajaan karena *fraud* lebih banyak terjadi secara sembunyi.

Setelah disusunnya strategi dan metode pendeteksian, diperlukan alat yang mendukung pendeteksian penindakan *fraud*. Pendeteksian *fraud* dapat dilakukan dengan beberapa prosedur yang relevan seperti menggunakan aplikasi, *whistle blowing*, teknologi, dan yang paling terbaru adalah dengan menggunakan *artificial intelligence* atau AI (PwC, 2018). Penggunaan AI dikabarkan lebih efektif karena *fraud* yang berlangsung semakin bervariasi dan teknologi saja tidak cukup untuk mendeteksi akan terjadinya *fraud*. Walaupun demikian, tidak semua perusahaan telah menggunakan AI, tetapi masih menggunakan teknologi dan alat-alat pendeteksian lainnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan strategi penulisan dalam bentuk penelitian kualitatif. Artinya penelitian akan dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data penelitian berdasarkan laporan yang dibuat oleh firma yang berwenang dalam pendeteksian fraud yaitu PwC, KPK, ACFE, and ICW. Data yang diambil berupa strategi deteksi, metode, dan alat yang digunakan selama beberapa tahun. Data-data tersebut akan dirangkum, diolah, serta di analisa. Penelitian ini menjelaskan metode, strategi beserta alat yang digunakan firma-firma yang berwenang tersebut dalam melakukan pendeteksian terhadap *fraud*. Baik dari segi ketepatannya, keakuratan, dan lainnya secara menyeluruh akan dibandingkan. Terlebih lagi keempat firma tersebut tersebar di seluruh dunia dan memiliki kewenangan dalam pendeteksian pada daerah yang terlibat seperti secara global atau dunia, dalam negara seperti pada asia pasifik dan Indonesia, dan juga pada suatu perusahaan yang memiliki kondisi lingkungan yang bervariasi dan skala yang berbeda. Penelitian ini juga dijelaskan secara deskriptif akan data-data yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendeteksian *fraud* yang dilakukan oleh firma-firma yang berwenang tersebut. Kebijakan yang dibuat mengenai metode, strategi, dan alat yang digunakan ditetapkan dalam rangka untuk mencegah terjadinya kerugian yang akan dialami seluruh pemangku kepentingan

PwC merupakan kantor akuntan publik yang masuk ke dalam Big 4 firma akuntansi di Dunia dan tersebar disegala penjuru dunia. Berdasarkan laporan PwC selama 10 tahun, PwC telah mengadopsi beberapa strategi dalam pendeteksian *fraud*. Berdasarkan laporan PwC (2001), PwC melakukan beberapa strategi dalam pendeteksian fraud yang dimana dengan melakukan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan akan urgensi dari adanya *fraud* tersebut. Kemudian melakukan penilaian resiko terhadap manajemen dan melakukan *monitoring* terhadap kebijakan yang ada. Kemudian berdasarkan laporan PwC (2003), PwC melakukan penilaian risiko dan kerentanan yang nyata terhadap *fraud* pada organisasi. PwC juga secara proaktif untuk memantau rusuko dan melindungi pelapor dari *fraud* tersebut. Kemudian dikutip pada laporan PwC (2007) dan PwC (2009), dalam mendeteksi *fraud*, harus dilakukan dengan memastikan bahwa pedoman etika perusahaan dapat diterapkan serta memasukan aturan yang eksplisit dengan hukum pidana sesuai dengan negara yang beroperasi. Kemudian pada tahun 2011, laporan yang dilakukan oleh PwC (2011) mengungkapkan bahwa strategi yang digunakan yaitu:

1. *Corporate control* yang berkaitan dengan audit internal, manajemen risiko penipuan, pemantauan transaksi mencurigakan dengan otomatis, dan keamanan perusahaan,
2. *Corporate culture* yaitu menjaga informasi secara internal dan eksternal dan kerahasiaan
3. *Beyond the influence of management* yang artinya *fraud* diketahui secara tidak sengaja.

Kemudian pada tahun 2014, PwC memfokuskan pada *whistle blowing* sebagai strategi dari pendeteksi fraud (PwC, 2014). *Whistle blowing* merupakan sebuah prosedur dalam penyampaian pengaduan atas penindakan yang menyimpang yang melibatkan semua orang yang terkait dalam sebuah perusahaan seperti pegawai atau karyawan, manajemen tingkat atas, pemilik perusahaan, dan lainnya yang dimana yang melaporkan penindakan tersebut tidak terlibat akan perbuatan yang menyimpang atau *fraud* tersebut (Teichmann *et al.*, 2018). PwC juga mengungkapkan bahwa dengan adanya *whistle blowing* maka pendeteksian fraud akan semakin efektif.

Pada tahun 2018, PwC merancang menempatkan pendeteksian *fraud* pada garis pertama dalam *3 defense line* (PwC, 2018) yang dimana pertahanan garis pertama dilakukan oleh operasional perusahaan karena berada paling depan. Kemudian dilanjutkan oleh manajemen risiko dan kepatuhan yang terstruktur. Pada lapisan ketiga dilaksanakan oleh auditor baik internal maupun eksternal. Tentunya hal-hal tersebut ditujukan untuk mendapatkan pengendalian internal yang efektif.

Menurut PwC (2020), cara terbaik dalam pendeteksi *fraud* adalah bertindak walaupun semua prosedur pendeteksian *fraud* telah dinilai. Hal tersebut dikarenakan *fraudster* dan tindakan *fraud* yang dilakukan terus berkembang yang dimana menunjukkan akan terdapat risiko baru yang terjadi. Apabila tindakan tidak dilakukan sebagai perkembangan yang lebih lanjut, maka terdapat kemungkinan terpapar risiko.

Berdasarkan strategi yang dirancang oleh PwC selama 2 dekade, PwC terus mengembangkan strategi yang digunakan dalam pendeteksian *fraud*. Perkembangan atas strategi tersebut didasari dengan perpaduan antara metode dan alat yang digunakan serta pihak-pihak yang terlibat akan pendeteksian. Terlihat bahwa PwC sangat mengutamakan kontrol internal karena kontrol internal yang kuat akan mengurangi perkembangan dan penambahan *fraud*.

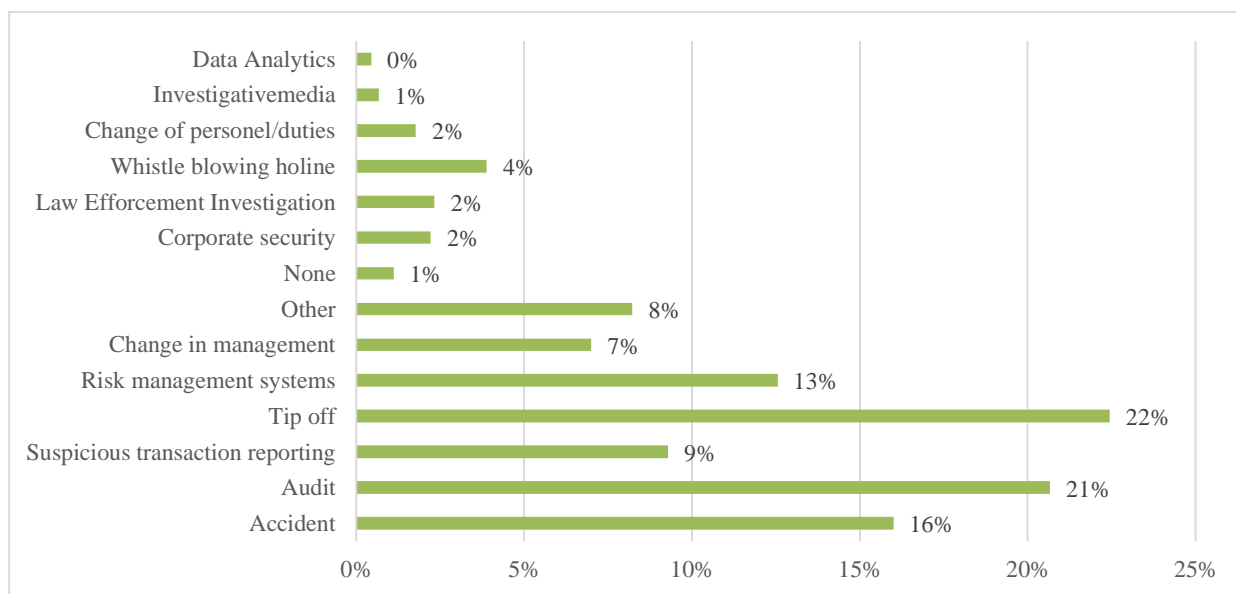
Kemudian sebagai lembaga yang bewenang dalam memberantas korupsi di Indonesia, KPK juga memiliki rancangan strategi yang digunakan untuk mendeteksi dan memberantas korupsi yang merupakan tindakan *fraud* yang sering terjadi di Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 2003, KPK mulai merancang strategi untuk mendeteksi terjadinya *fraud* yang dimulai dengan pengembangan sumber daya manusia. Setiap SDM didukung karena terjadinya *fraud* juga diawali oleh pihak-pihak yang terlibat. Kemudian pada tahun 2005 dan 2006, KPK senantiasa melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah serta memberikan saran apabila terdapat potensi terjadinya penindakan korupsi (Laport KPK, 2006). Kemudian pada tahun 2009 dan 2010, KPK kembali melakukan evaluasi terhadap SOP yang dirancang serta melakukan pemeriksaan akan gratifikasi. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001, gratifikasi merupakan pemebrian dalam arti luas yang mencakup pemberian uang, rabat, hadiah, dan lainnya., Gratifikasi berbeda dengan suap. Berdasarkan pernyataan yang diterangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, gratifikasi tidak dilakukan dengan kesepakatan dan suap dilakukan dengan adanya kesepakatan. Kemudian pada tahun 2010, KPK menerapkan sistem KWS atau KPK Whistleblower System yang dimana disediakan bagi pihak yang ingin melapor indikasi korupsi namun takut jika identitasnya diketahui. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya KPK selalu meningkatkan strategi dalam pemantauan dan pendeteksian menggunakan alat-alat yang ada. Dan pada tahun 2014, KPK melakukan penandatanganan MoU dengan KPPU karena kerap menemukan kecurangan pada persaingan pasar. Pada tahun 2015, KPK meluncurkan Sistem Pengendalian Gratifikasi karena gratifikasi kerap terjadi dimanapun dan sangat rentan. Pada tahun 2016 KPK secara resmi bekerja sama dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang dimana sebelumnya telah bekerja sama dengan PPATK. Dengan demikian, terdapat jalan yang lebih luas dalam mendeteksi terjadinya korupsi karena korupsi rentan terjadi dan melewati lembaga keuangan untuk mencuci dananya. KPK juga menerapkan sistem keterbukaan BO atau *Beneficial Owner* yang berperan dalam melacak koruptor yang menyamarkan datanya. BO

merupakan pemilik manfaat yang memiliki kemampuan untuk mengotorisasi dan mengendalikan dan juga menerima manfaat dari perusahaan atau atas suatu tabungan dan aset lainnya (Gilmour, 2020). Maka dari itu tahap pendeteksian akan meningkat 1 langkah lebih maju. Kemudian pada tahun 2017, KPK membagi 3 kelompok dalam strategi yang mencakup kelompok keaja pencegahan, deteksi, dan penyelesaian. Selain itu, pada tahun 2018 ke atas KPK secara senantiasa melakukan koordinasi dan memantau evaluasi di setiap lembaga pemerintahan dan melakukan penegakan hukum.

Berdasarkan strategi yang dilakukan KPK sejak didirikan, KPK masih mengembagkan penindakan korupsi yang terjadi di Indonesia. Selama belasan tahun berdiri KPK telah banyak menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang terjadi. KPK juga melakukan banyak kejasama dengan pihak-pihak yang berwenang karena tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dan banyak kasus yang masih tertutup. Korupsi juga berkaitan dengan pencucian uang, dan hal tersebut juga menutup pendeteksian korupsi yang dimana KPK harus lebih keras dalam pendeteksian.

Apabila terdapat berbagai variasi *fraud* yang terjadi, maka akan terdapat metode pendeteksian yang bervariasi. Baik PwC, KPK, ACFE, dan ICW masing-masing memiliki metode yang berbeda dalam melakukan pedeteksian *fraud* tergantung dengan objek dan lokasi yang menjadi tujuannya. Walaupun demikian, metode yang digunakan tidak semuanya efektif dan tidak semuanya tidak memiliki kontribusi.

PwC yang merupakan kantor akuntan publik yang telah berdiri selam puluhan tahun dan tersebar di seluruh dunia telah merancang berbagai variasi metode dalam implementasinya. Berikut metode yang digunakan oleh PwC dari tahun 2001 sampai tahun 2019.

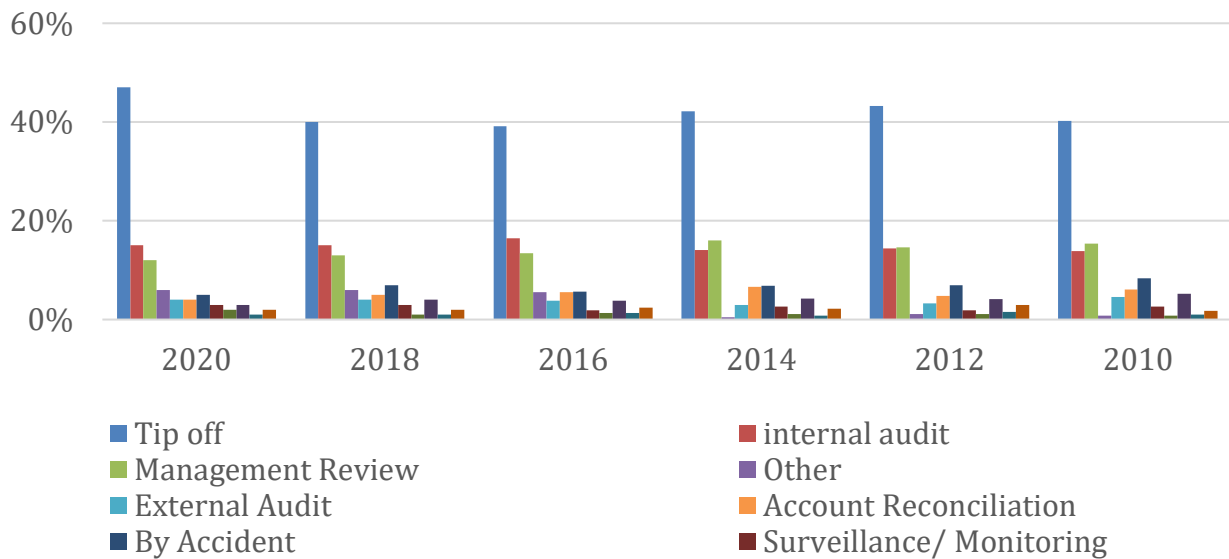


Sumber: Laporan PwC 2001-2019

**Gambar 1 Metode Deteksi oleh PwC Periode 2001-2019**

Berdasarkan laporan PwC selama 2001-2019, metode yang paling banyak menemukan adanya penindakan *fraud* adalah dengan tip off baik secara internal maupun eksternal. Kemudian diikuti dengan pendeteksian oleh audit yang dimana auditor bertanggung jawab atas pemeriksaan. Kemudian diikuti oleh kecelakaan yang dimana artinya banyak *fraud* yang terjadi tanpa disengajai. Kemudian diikuti oleh sistem manajemen risiko dan laporan transaksi mencurigakan yang dimana indikasi risiko akan terlihat jelas melalui transaksi yang dilakukan. Perubahan manajemen juga merupakan metode yang efektif dalam mendeteksi *fraud* karena pergantian seseorang atau manajemen akan membongkar *fraud* yang telah dilakukan oleh orang

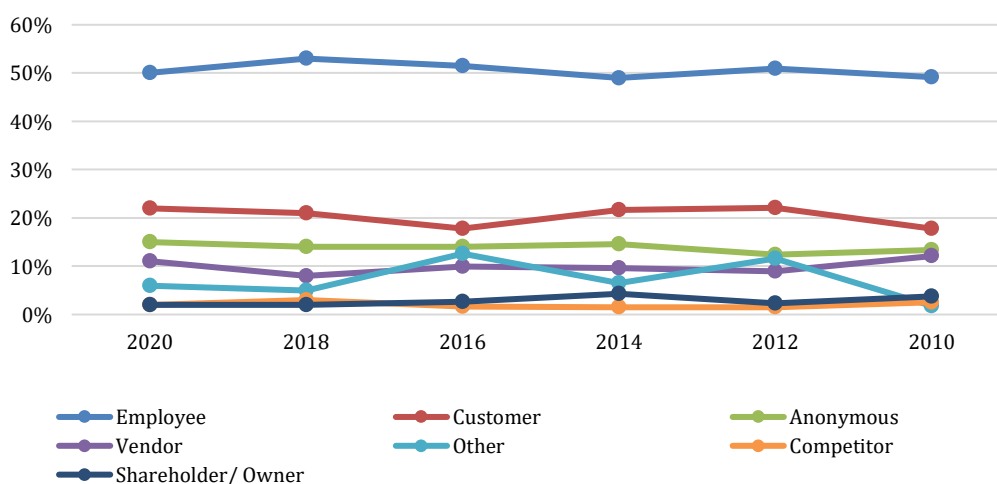
atau oknum yang melakukan tindakan tersebut. Kemudian diikuti oleh *whistle blower* namun efektifitasnya tidak melebihi metode yang lain yang diduga karena tidak semua orang ingin melaorkan tindakan tersebut karena alasan tertentu. Kemudian terdapat analisa data, mdia investigatif, dan metode lainnya.



Sumber: Laporan ACFE Global 2010-2020

**Gambar 2 Metode Deteksi oleh ACFE Global Periode 2010-2020**

Berdasarkan grafik di atas, metode pendeteksian yang paling banyak digunakan oleh ACFE Global adalah *tip off*. Kemudian, diikuti oleh penggunaan *internal audit* dan *management review* di perusahaan. Selain itu, terdapat penggunaan cara lain dalam mendeteksi *fraud* yang mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2020. Terdapat juga pendeteksian yang dilakukan dengan menggunakan jasa audit eksternal, rekonsiliasi akun, dan pendeteksian yang ditemukan secara tidak sengaja. Penggunaan deteksi melalui *monitoring* dan *IT controls* perusahaan sangat rendah pada grafik ini, diikuti oleh *document examination* yang mengalami penurunan sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Metode pendeteksian yang paling sedikit digunakan adalah *notified by law* dan *confession*. Artinya, sedikit pelaku *fraud* yang mau mengaku melakukan *fraud*. Dalam mendeteksi *fraud*, terdapat beberapa pihak yang melakukan pelaporan atau *tip off*. Berikut disajikan grafik mengenai pihak yang melaporkan *fraud*.

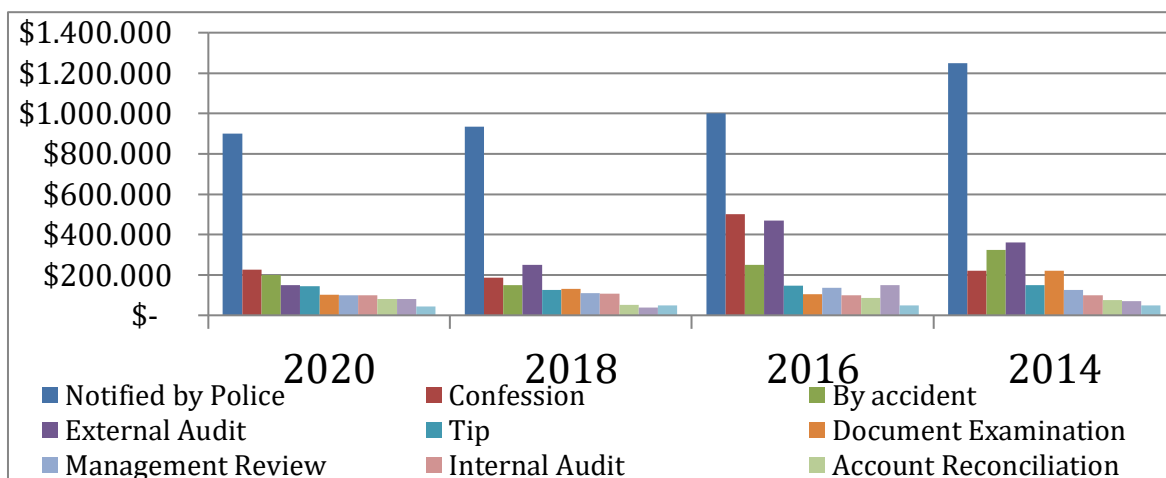


Sumber: Laporan ACFE Global 2020

**Gambar 3 Pihak yang Melakukan Pelaporan Fraud**

Berdasarkan Gambar.3, pihak yang paling banyak melaporkan *fraud* pada tahun 2010 hingga 2020 adalah karyawan perusahaan. Diiukti oleh pelanggan yang menempati posisi kedua dan pelaporan tanpa nama pada posisi ketiga. Selanjutnya terdapat pelaporan dari vendor dan pihak pelapor lain yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Di posisi terakhir, terdapat pesaing dan pemilik, karena pemilik memastikan tidak ada pelaporan mengenai berita buruk di perusahaannya.

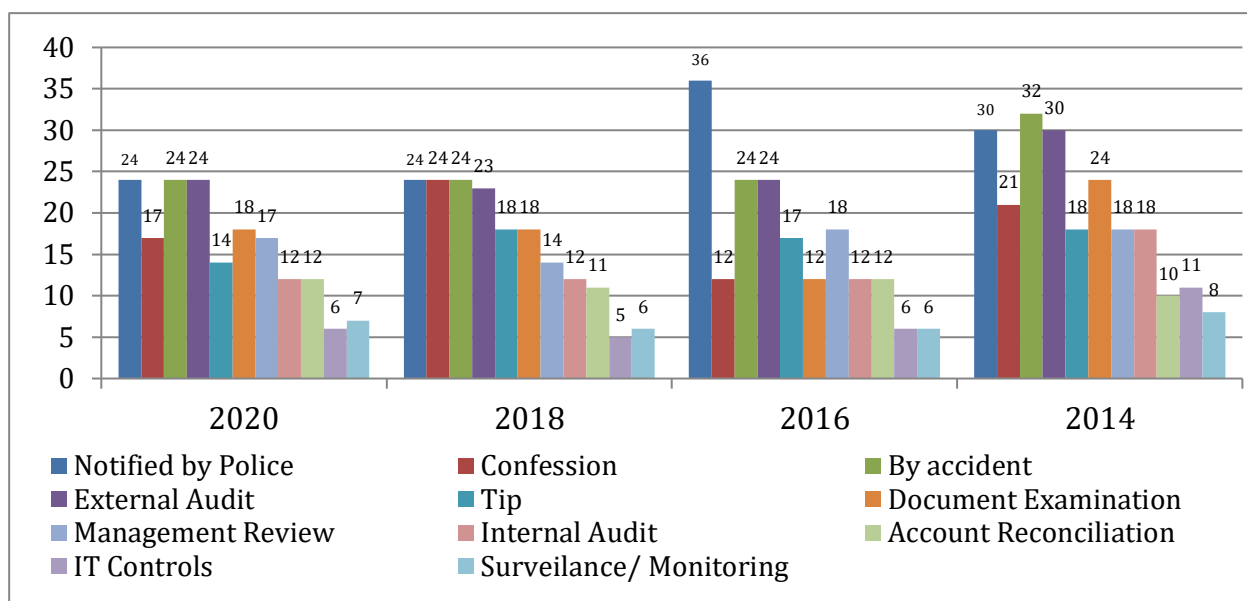
Berdasarkan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* (2020), pengelompokan metode dibagi menjadi tiga berdasarkan *median loss* dan *duration*nya yaitu, kelompok aktif, kelompok pasif, dan kelompok yang berada di antara aktif dan pasif. Kelompok aktif merupakan kelompok metode pendeteksian yang memiliki *median loss* yang rendah dan durasi pendeteksian cepat, terdiri dari *document examination, management review, internal audit, account reconciliation, IT controls, dan surveillance/ monitoring*. Sebaliknya, kelompok pasif merupakan kelompok metode pendeteksian yang memiliki *median loss* terbesar dan durasi pendeteksian yang lama, terdiri dari *notified by law, confession, dan by accident*. Sedangkan, kelompok yang berada di antara dua kelompok tersebut merupakan kelompok yang memiliki *median loss* tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan durasi pendeteksian tidak lama dan tidak cepat, terdiri dari *external audit dan tip*. Pada tabel di bawah, diuraikan besaran kerugian dan lamanya prosedur dalam melakukan pendeteksian *fraud* pada masing-masing metode.



Sumber: Laporan ACFE Global 2020

**Gambar 4 Rata-rata Kerugian**

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada gambar 4.4, kelompok pasif yaitu *notified by law, confession, dan by accident* memiliki kerugian terbesar dibanding kelompok lainnya. Kerugian terbesar oleh *notified by law* mengalami puncaknya pada tahun 2014 dan kemudian mengalami penurunan. Sedangkan kelompok aktif memiliki kerugian terkecil dari tahun 2014 hingga 2020.



Sumber: Laporan ACFE Global 2020

**Gambar 5 Rata-rata Durasi**

Pada Gambar 4.5, kelompok pasif yaitu *notified by law* dan *by accident* memiliki durasi terbesar dibanding kelompok lainnya. Sedangkan, durasi external audit dari 2014 hingga 2020 berhasil memasuki kelompok pasif dan mengalahkan durasi *confession* selain pada tahun 2018. Selanjutnya, diikuti oleh kelompok aktif yang metode pendeteksian memiliki durasi yang singkat.

Berdasarkan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020)*, banyak organisasi yang gagal dalam menerapkan *fraud reporting systems*. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem dimana karyawan dapat melaporkan *fraud* secara “*anonymously*” melalui telepon atau *web-based portal*. Kemampuan dalam melaporkan *fraud* secara *anonymously* adalah kunci karena beberapa karyawan takut dalam membuat laporan dimana adanya ancaman atau balasan dari atasan atau adanya reaksi negatif dari kolega lainnya. Menurut Johansson dan Carey (2016), karyawan dengan jabatan rendah lebih sering melaporkan *fraud* ketika *hotline external* tersedia karena risiko pembalasan lebih rendah. Beberapa *third-party hotline systems* menawarkan program untuk meningkatkan kesadaran mengenai cara melaporkan *fraud*.

Alat pendeteksian yang digunakan tentunya akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu, Salah satunya adalah penggunaan teknologi. Menurut PwC (2020) apabila hanya mengandalkan teknologi, pendeteksian *fraud* tidak akan maksimal. Hal tersebut dikarenakan *fraud* akan bervariasi dan terus berkembang dan melampaui kecepatan berkembangnya teknologi, Maka dari itu pendeteksian *fraud* ditingkatkan dengan menggunakan *artificial intelligence* atau AI. AI merupakan kecerdasan buatan yang tersistematisasi untuk mengolah data dengan pola pikir manusia yang belajar secara otomatis dari data dan informasi yang ada (Bounatirou & Lim, 2020). Maka dari itu, semakin bervariasi jenis *fraud*, maka dengan bantuan AI, akan semakin banyak *fraud* yang terdeteksi.

Selain itu, terdapat juga *whistleblowers* yang bertugas untuk melapor *fraud* sesuai dengan perlindungan data dan peraturan privasi EU (Abazi, 2020). Berdasarkan data yang diperoleh dari *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020)*, terdapat tiga pihak pilihan oleh *whistleblowers* untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan *fraud* di perusahaan, yaitu *direct supervisor* sebesar 28%, *fraud investigation team* sebesar 14%, dan *internal audit* sebesar 12%. Terdapat beberapa mekanisme pelaporan formal yang digunakan oleh *whistleblower*.



**Tabel 1 Mekanisme Pelaporan Formal yang Digunakan Whistleblowers**

Year	Telephone hotline	Email	Online form	Mailed letter / form	Other	Fax
2020	33%	33%	32%	12%	9%	1%
2018	42%	26%	23%	16%	9%	1%
2016	40%	34%	24%	17%	10%	2%

Sumber: Laporan ACFE Global 2020

Berdasarkan tabel di atas, lebih dari setengah *whistleblower* menggunakan pelaporan berbasis internet. Pada pelaporan berbasis *mailed letter* dapat dilihat mengalami penurunan dari 17% ke 12%, diikuti juga oleh penurunan penggunaan pelaporan lainnya dan pelaporan menggunakan *fax*. Sedangkan, pelaporan menggunakan *online form* dan *email* mengalami penurunan di tahun 2018 dan meningkat kembali secara signifikan di tahun 2020. Sedangkan penggunaan *telephone hotline* mengalami peningkatan di tahun 2018 dan menurun di tahun 2020. Namun, untuk mekanisme pelaporan paling banyak digunakan dari tahun ke tahun adalah *telephone hotline*. Hal ini menunjukkan bahwa, para *whistleblowers* juga lebih memilih penggunaan *internet* dalam pelaporannya karena lebih efisien dan efektif.

Penggunaan *hotline* ini menjadi sangat penting karena efektif dan terbukti dalam meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mendeteksi *fraud*. Terbukti dari data ACFE Global bahwa penggunaan *hotline* mengalami peningkatan sebesar 49% pada tahun 2020. Berdasarkan data *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020)*, rata-rata kerugian yang dialami oleh perusahaan dengan *hotline* sebesar US \$100,000 dan pada perusahaan yang tidak menggunakan *hotline* sebesar US \$198,000. Dapat dilihat bahwa perusahaan tanpa *hotline* mengalami kerugian hampir sebesar 2 kali lipat dari perusahaan yang menggunakan *hotline*. Selain penggunaan *hotline*, karyawan di perusahaan juga harus mendapatkan pelatihan terhadap kesadaran *fraud*. Kasus yang terdeteksi dari pelaporan oleh karyawan yang mendapatkan pelatihan sebesar 48% dan kasus yang terdeteksi dari pelaporan oleh karyawan yang tidak mendapatkan pelatihan adalah sebesar 36% *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020)*. Dapat disimpulkan bahwa pelaporan lebih sering disampaikan oleh karyawan pada perusahaan dengan pelatihan kesadaran. Menurut Wulandari dan Nuryanto (2018), dengan dilakukannya pelatihan kesadaran maka dapat meningkatkan kepedulian semua pihak di dalam organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Memaparkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan yang ditulis dengan sistematis, kemudian dilakukan analisis secara kritis, dan disajikan secara informatif. penggunaan tabel, gambar dsb hanya sebagai pendukung yang memperjelas pembahasan dan dibatasi hanya pada pendukung yang benar-benar substantial, misalnya tabel hasil pengujian statistik, gambar hasil pengujian model dsb. pembahasan hasil bersifat argumentatif menyangkut relevansi antara hasil, teori, penelitian terdahulu dan fakta empiris yang ditemukan, serta menunjukkan kebaruan temuan yang dituliskan dalam paragraf mengalir

## SIMPULAN

*Fraud* merupakan tindakan penyimpangan yang sangat tabu untuk dilakukan namun sangat rentan terjadi setiap lingkungan dan di setiap kondisi. Hal tersebut memicu kerugian bagi korban dan menyebabkan pendeteksian *fraud* harus lebih kuat. Setiap daerah dan negara memiliki lembaga yang berfungsi untuk mendeteksi terjadinya *fraud*. Baik secara global, dan nasional, pendeteksian *fraud* kerap dilakukan dengan semaksimal mungkin.

Dalam segi strategi, PwC menggunakan beberapa strategi yaitu dengan penilaian risiko, *monitoring*, dan komunikasi. PwC juga kerap melakukan *corporate control*, *corporate culture*, dan *beyond the influence of management* sebagai strategi dalam mendeteksi terjadinya *fraud*. Menurut PwC, cara terbaik untuk mendeteksi *fraud* adalah dengan menggunakan tindakan dan

perkembangan karena *fraud* terus melakukan perkembangan dengan motif-motif yang baru. Kemudian KPK juga mengutamakan peningkatan pada SDM sebagai strategi perdana dalam pendeteksian *fraud*. KPK dalam belasan tahun mengembangkan strategi yang bervariasi mulai dari pengadopsian teknologi, dan lembaga-lembaga lainnya untuk bekerja sama dalam pendeteksian korupsi yang merupakan bagian dari penindakan *fraud*. Lembaga-lembaga tersebut bergerak di bidang yang berbeda dan objek yang berbeda yang dimana memiliki target dan strategi yang berbeda dan sudah secara maksimal melakukan pendeteksian namun belum dapat mengungkap seluruh perbuatan menyimpang dengan maksimal karena perkembangan yang terus terjadi.

Berdasarkan metode yang dilakukan, terdapat banyak jenis metode yang telah melewati perkembangan selama puluhan tahun untuk mendeteksi terjadinya *fraud*. Berdasarkan data yang dilakukan oleh PwC selama 20 tahun, *tip off* secara eksternal dan internal merupakan metode yang paling banyak mendeteksi *fraud* dan kemudian diikuti oleh audit, ketidaksengajaan, dan sistem manajemen risiko. Walaupun demikian, ACFE juga memiliki hasil yang sama dengan PwC yang dimana metode yang paling banyak digunakan dalam mendeteksi *fraud* adalah *tip off* dan juga diikuti oleh audit sebagai metode kedua terbanyak yang dilakukan. Berdasarkan laporan ACFE, *fraud* banyak ditemukan oleh karyawan perusahaan sendiri dan baru kemudian diikuti oleh pelanggan. Dan pada posisi terakhir, pesaing perusahaan yang mengungkapkan terjadinya *fraud*. ACFE juga menerangkan terdapat 3 metode untuk pendeteksian *fraud* yang terdiri dari kelompok aktif, pasif, dan berada diantara 2 kelompok tersebut yang memiliki metode pendeteksian yang berbeda. Tentunya metode pendeteksian tersebut memiliki durasi nya masing-masing. Berdasarkan data yang dilaporkan ACFE, kelompok pasif yaitu *notified by law* memiliki durasi terbesar dibandingkan kelompok lainnya sedangkan kelompok aktif memiliki durasi yang singkat. Penggunaan metode dan pengelompokannya mengikuti objek dan capaian yang diekspektasikan oleh lembaga yang melaksanakannya.

Berdasarkan alat pendeteksian, terdapat beberapa jenis alat untuk mendeteksi yaitu seperti *whistle blower* yang kerap digunakan hampir seluruh lembaga didunia. Kemudian terdapat penggunaan hotline yang sangat penting dan efektif karena meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan pendeteksian terhadap *fraud*. Selain itu, teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung pendeteksian. Teknologi yang digunakan tidak hanya teknologi saja tetapi juga melibatkan *artificial intelligence* atau AI karena *fraud* yang terus bervariasi.

Berdasarkan metode, strategi, serta alat yang digunakan, semuanya telah dirancang sedemikian rupa untuk mendeteksi secara maksimal walaupun hasil pendeteksian belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan *fraud* terus berkembang dan memiliki motif-motif baru yang mengharuskan lembaga-lembaga dan juga perusahaan sendiri harus mengambil tindakan yang lebih lanjut dalam pendeteksian *fraud* agar tidak membuat dan menambah kerugian. Berdasarkan yang sudah dilaksanakan oleh lembaga dari masing masing daerah baik dari segi global, Asia Pasifik, dan Indonesia, semuanya telah bervariasi mengikuti zaman, akurasi, dan efektifitas dari metode yang ada.

Baik dari strategi, metode, dan alat, semua hal tersebut sangat berhubungan erat satu sama lain. Dengan adanya strategi, metode, dan alat pendeteksian yang optimal, maka pendeteksian *fraud* akan lebih maksimal. Walaupun objek dan pihak yang melakukan deteksi menggunakan strategi, metode, dan alat yang berbeda, proses pendeteksian tetap menjadi hal yang harus diperhatikan dan dikembangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abazi, V. (2020). The European Union whistleblower directive: A “game changer” for whistleblowing protection? *Industrial Law Journal*, 49(4), 640–656. <https://doi.org/10.1093/inclaw/dwaa023>

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2020). *Report To the Nations 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse*.
- Bounatirou, M., & Lim, A. (2020). A case study on the impact of artificial intelligence on a hospitality company. *Advanced Series in Management*, 24, 179–187. <https://doi.org/10.1108/S1877-636120200000024013>
- Coopers, P. R. (2007). Economic crime : people , culture and controls. *The 4th Biennial Global Economic Crime Survey: Russia*. [http://www.pwc.ru/en/forensic-services/assets/gesc\\_russian\\_supplement\\_eng.pdf](http://www.pwc.ru/en/forensic-services/assets/gesc_russian_supplement_eng.pdf)
- Gilmour, P. M. (2020). Lifting the veil on beneficial ownership: Challenges of implementing the UK’s registers of beneficial owners. *Journal of Money Laundering Control*, 23(4), 717–734. <https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2020-0014>
- Johansson, E., & Carey, P. (2016). Detecting Fraud: The Role of the Anonymous Reporting Channel. *Journal of Business Ethics*, 139(2), 391–409. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2673-6>
- Kolli, C. S., & Tatavarthi, U. D. (2020). Fraud detection in bank transaction with wrapper model and Harris water optimization-based deep recurrent neural network. *Kybernetes*, 50(6), 1731–1750. <https://doi.org/10.1108/K-04-2020-0239>
- Kummer, T. F., Singh, K., & Best, P. (2015). The effectiveness of fraud detection instruments in not-for-profit organizations. *Managerial Auditing Journal*, 30(4–5), 435–455. <https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2014-1083>
- Laptah\_KPK\_2006.pdf*. (n.d.).
- Price water house coopers. (2003). *Economic Crime Survey 2003*. 1–24.
- Pricewaterhousecoopers. (2001). *European economic crime survey 2001*.
- Pwc. (2011). Cybercrime : Global Economic Crime Survey. *Economic Crime People Culture and Controls, November*, 40. [www.pwc.com/crimesurvey](http://www.pwc.com/crimesurvey)
- PwC. (2014). *Economic Crime: a Threat to Business Globally*. 1–57.
- PwC. (2018). Global Economic Crime and Fraud Survey 2018. *PwC*, 30. <https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-survey-2018.pdf>
- PwC. (2020). Fighting Fraud: A Never-Ending Battle PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey. *PWC Fraud Survey*, 1–14. [www.pwc.com/fraudsurvey](http://www.pwc.com/fraudsurvey)
- Repousis, S., Lois, P., & Veli, V. (2019). An investigation of the fraud risk and fraud scheme methods in Greek commercial banks. *Journal of Money Laundering Control*, 22(1), 53–61. <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2017-0065>
- Siregar, S. V., & Tenoyo, B. (2015). Journal of Financial Crime Fraud awareness survey of private sector in Indonesia Fraud awareness survey of private sector in Indonesia. *Journal of Financial Crime Managerial Auditing Journal Journal of Financial Crime Iss Journal of Financial Crime Journal of Financial Crime Journal of Financial Crime*, 222222(1), 329–346. <http://dx.doi.org/10.1108/JFC-03-2014-0016%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1108/JFC-07-2013-0045>
- Teichmann, F. M., Sergi, B. S., Teichmann, F. M., & Sergi, B. S. (2018). *Compliance in Multinational Corporations Article information : The Global Economic Crime Survey*. (2009). November.
- Wulandari, D. N., & Nuryanto, M. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(2), 117. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.557>